

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep pemerintahan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia, *good governance* adalah persepsi yang berkaitan dengan proses tercapainya suatu keputusan yang dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak. Hal ini sejalan dengan definisi *good governance* menurut Enceng, Lestyodono, & Purwaningdyah, (2008), *good governance* adalah suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa kepada publik. Dengan adanya *good governance*, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan berlandaskan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara.

Beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah keterbukaan/transparansi dan akuntabilitas. Transparansi secara sederhana dapat diartikan keterbukaan atas informasi, sedangkan akuntabilitas dalam sektor publik merupakan kewajiban seorang agen untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada *principal* (Mardiasmo, 2018). Salah satu implementasi dari kedua prinsip tersebut adalah diwajibkannya pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan amanat dari

UU Nomor 17 Tahun 2003 serta publikasi kepada masyarakat umum agar kinerja pemerintah dapat diketahui setiap tahunnya.

Dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terkait dengan jenis laporan keuangan yang dibuat. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai implementasi akuntansi berbasis kas. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun Laporan Operasional (LO), neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai implementasi akuntansi berbasis akrual.

Laporan keuangan pemerintah berisi kumpulan akun-akun yang biasa disebut dengan pos akun. Salah satu pos akun tersebut adalah pos belanja. Belanja dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi dengan harapan dapat membuat pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan terkait belanja adalah kurangnya perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengingat jumlah anggaran yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Kusuma, 2018). Pos belanja barang dan jasa merupakan salah satu pos belanja dengan proporsi anggaran yang besar. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal tahun anggaran

2020, belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp625.199.796.000,00 atau sebesar 28.3% dari total belanja sebesar Rp 2.211.813.962.000,00. Demikian pula pada tahun anggaran 2019, belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp638.238.726.000 atau sebesar 26,6% dari total anggaran belanja sejumlah Rp2.399.784.504.000. Dengan proporsi anggaran yang besar, belanja barang dan jasa mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait belanja barang dan jasa pada Kabupaten Tegal. Kajian tersebut khususnya dalam penerapan akuntansi belanja dan beban barang dengan judul **“Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja dan Beban Barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis menentukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengklasifikasian pos belanja dan beban barang di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pos belanja dan beban barang di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan pos belanja dan beban barang di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengklasifikasian pos belanja dan beban barang di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
2. Mengetahui pengakuan dan pengukuran pos belanja dan beban barang di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
3. Mengetahui penyajian dan pengungkapan pos belanja dan beban barang di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir yang ditentukan penulis terbatas dengan lingkup pembahasan tinjauan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terkait pengklasifikasian, pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian pos belanja dan beban barang. Selain itu, penulis juga hanya menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Akademis

Hasil kajian/studi diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi belanja dan beban barang di pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Tegal. Tidak hanya itu, hasil kajian/studi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai

salah satu sumber referensi terkait akuntansi belanja dan beban barang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan bermanfaat dalam memahami secara praktis terkait penerapan akuntansi belanja dan beban barang pada pemerintah daerah terutama di Kabupaten Tegal. Baik dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan maupun penyajian belanja, dan beban barang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, kajian/studi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas praktik akuntansi belanja dan beban barang. Bahan pertimbangan tersebut digunakan agar praktik akuntansi belanja dan beban barang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab II akan menjelaskan teori-teori terkait akuntansi belanja dan beban barang yang bersumber dari buku maupun regulasi yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian, meliputi profil, visi dan misi, dan struktur organisasi objek. Selain itu, akan dibahas

mengenai analisis penerapan akuntansi belanja dan beban barang Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV simpulan dari hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi belanja dan beban barang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun anggaran 2020.